

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Kudhori, dkk. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, Vol.1.
- Arbie Gugus Wandira. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi Universitas Semarang, Vol. 2, No. 1.
- Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa. 2017. *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. *Accounting Global Journal*. Universitas Muria Kudus.
- Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik dan Restu Agusti. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau*. Jurnal SOROT, Vol. 10, No. 2.
- Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin. 2011. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. Edisi 8. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2012. *Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah*. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/8/105/2441.bpkp>. Diakses tanggal 26 Februari 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2018*. Tersedia: <https://jabar.bps.go.id/publication/2018/11/30/0e300ee48a50ce48d78c95ba/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2018>. Diakses tanggal 14 Februari 2020.
- Diah Nurdiwaty, dkk. 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan*

- yang Sah Terhadap Belanja Modal di Jawa Timur*. Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1.
- Dina Mei Eka Aditya dan Maryono. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal*. Prosiding SENDI U.
- Doni Silalahi, dkk. 2014. *Analisis Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dengan Metode Regresi Data Panel*. Sainia Matematika, Vol. 02, No. 03.
- Erdi Adyatama dan Rachmawati M. O. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol.4 No.2.
- Ernawati. 2017. *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. VI. No. 2.
- Fauzan Jauhar. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang.
- Febdwi Suryani dan Eka Pariani. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Vol.6 No.1.
- Gujarati Damodar N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5, Buku 2. Jakarta:Salemba Empat.
- I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vo. 20 No. 2.

- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan Dwiranda. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi*. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Novira Sartika, dkk. 2017. *Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. *SOROT*, Vol. 12 No. 2.
- Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Jakarta.
- Puspita, D. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Gunadarma.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusri. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta:ANDI.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sularso, H. dan Restianto, Y. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuang Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No.2.
- Suwandi, dkk. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Akuntansi dan Investasi.
- Syofian Siregar. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Edisi 1. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Wahyu Hidayat. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. Edisi 1. Malang: UMM Press.

Wikipedia. 2020. *Sejarah Jawa Barat*. Tersedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat). Diakses tanggal 26 Februari 2020.